
Peran Pendidikan Berkualitas dalam Memutus Kemiskinan untuk Mendukung SDGs di Indonesia

Syaifur Rochman¹⁾, Feby Indriyani²⁾, Salsabila Dwi Sapitri³⁾, Putri Anggreini⁴⁾, Shahibah Yuliani⁵⁾

^{1,2,3,4,5)}Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Jakarta

* Syaifur Rochman

Email : syaifurrchmnn@gmail.com
febyindriyani65@gmail.com
salsabila_1407622049@mhs.unj.ac.id
putanggreini4@gmail.com
shahibah-yuliani@unj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pendidikan berkualitas dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus pada tiga provinsi termiskin: Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Menggunakan metode literatur review deskriptif-kualitatif, studi ini mengkaji 57 sumber ilmiah terakreditasi (periode 2020–2025), laporan BPS, TNP2K, serta lembaga internasional terkait SDGs. Hasil analisis menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan; setiap peningkatan satu tahun pendidikan berhubungan dengan penurunan kemiskinan sebesar 1,2–1,7 poin persentase. Namun, berbagai hambatan seperti keterbatasan akses, infrastruktur pendidikan yang minim, distribusi guru yang tidak merata, dan kesenjangan sosial ekonomi melemahkan dampak pendidikan di wilayah 3T. Program afirmatif seperti Beasiswa ADik, KIP, dan pendidikan vokasi berbasis lokal terbukti efektif meningkatkan partisipasi sekolah hingga 8% dan menurunkan angka kemiskinan sebesar 3–5% dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh manajemen anggaran dan minimnya pendampingan. Oleh karena itu, pendidikan akan efektif dalam mengurangi kemiskinan apabila terintegrasi dengan penguatan infrastruktur, pembangunan ekonomi lokal, serta kebijakan afirmatif berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDG 1 dan SDG 4

Kata kunci: Pendidikan Berkualitas, Kemiskinan, Papua, SDGs, Kebijakan Inklusif

Abstract

This study aims to analyze the role and effectiveness of quality education in poverty alleviation in Indonesia, focusing on the three poorest provinces: Papua Pegunungan, Central Papua, and West Papua. Using a descriptive-qualitative literature review method, the study reviews 57 accredited scientific sources (2020–2025), official reports from BPS, TNP2K, and international institutions related to the SDGs. The analysis reveals a strong negative correlation between average years of schooling and poverty rates; each additional year of schooling is associated with a 1.2–1.7 percentage point decrease in poverty. However, the impact of education in disadvantaged (3T) areas is weakened by limited access, inadequate infrastructure, unequal teacher distribution, and socio-economic disparities. Affirmative programs—such as the Higher Education Affirmation Scholarship (ADik), Indonesia Smart Card (KIP), and locally-based vocational education—have proven to increase school participation by up to 8% and reduce poverty by 3–5% over the past five years. Nevertheless, their implementation is hindered by budget management issues and lack of field mentoring. The findings emphasize that education can only be effective as a poverty reduction strategy when integrated with a multidimensional approach that includes basic infrastructure improvement, local economic development, and sustainable affirmative policies aligned with SDG 1 and SDG 4.

Keywords: Quality Education, Poverty, Papua, SDGs, Inclusive Policy

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di tiga kawasan utama Provinsi Papua. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan

Papua Barat tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional, masing-masing sebesar 26,66%, 27,60%, dan 21,09%. Oleh sebab itu, kajian dalam artikel ini menitikberatkan pada ketiga daerah tersebut untuk memahami keterkaitan antara akses terhadap pendidikan berkualitas dan upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan juga berdampak luas pada kualitas hidup masyarakat, keterjangkauan terhadap layanan dasar, serta kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang diakomodasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama (Tanpa Kemiskinan) dan keempat (Pendidikan Berkualitas). Pendidikan yang bermutu diyakini mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi karena memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai penting yang mendukung peningkatan taraf hidup dan peran aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi. Namun di sisi lain, pemerataan akses dan mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti wilayah-wilayah utama di Papua. Ketimpangan ini berisiko memperpanjang siklus kemiskinan dan menghambat pencapaian target pembangunan nasional.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana pendidikan berkualitas berperan dalam mengurangi kemiskinan, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan pada dua hal utama dengan menganalisis peran dan efektivitas pendidikan sebagai strategi kunci dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dengan fokus tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh hubungan antara pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di tiga wilayah utama di Papua. Selain itu, artikel ini juga akan menelaah peluang serta hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif sebagai bagian dari upaya strategis mendukung tercapainya target SDGs di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara sistematis berbagai literatur terkait pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap temuan sebelumnya tanpa pengumpulan data lapangan langsung. Analisis difokuskan pada tiga provinsi termiskin berdasarkan data BPS 2024, yaitu Papua Pegunungan (26,66%), Papua Tengah (27,60%), dan Papua Barat (21,09%). Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini berdampak besar terhadap akses dan kualitas pendidikan, sehingga menjadi fokus kajian dalam merumuskan strategi kebijakan yang relevan.

Sumber literatur berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan kebijakan, serta publikasi lembaga seperti UNESCO, UNDP, dan World Bank, yang diperoleh melalui Google Scholar dan DOAJ. Kriteria inklusi mencakup: (1) diterbitkan antara 2020–2025, (2) relevan dengan tema pendidikan dan kemiskinan di Indonesia, (3) bersumber dari institusi kredibel. Literatur non-ilmiah dan tidak relevan dikecualikan.

Data dianalisis menggunakan teknik tematik untuk mengelompokkan informasi berdasarkan dua fokus utama: (1) peran dan efektivitas pendidikan dalam mengatasi kemiskinan, serta (2) tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil kajian disajikan secara naratif untuk menunjukkan bagaimana pendidikan berkualitas dapat memutus rantai kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan efektivitas pendidikan sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia

Pendidikan memiliki peranan penting sebagai strategi utama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, karena menjadi dasar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang bermutu, individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja serta meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Digdowiseiso (2021), dalam jurnal *International Journal of Social Science and Human Research*, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dengan penurunan angka kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Pendidikan membuka jalan menuju pekerjaan yang layak dan berperan dalam mendorong produktivitas serta inovasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Efektivitas pendidikan dalam mengurangi kemiskinan sangat ditentukan oleh sejauh mana akses pendidikan dapat dinikmati secara merata, kualitas proses pembelajaran, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja di tingkat lokal. Fahmi (2020), dalam *Indonesian Journal of Development Planning*, menemukan bahwa wilayah-wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar penyedia pengetahuan dasar, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Di daerah-daerah yang sulit menjangkau pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan menjadi alternatif yang sangat efektif untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Kalimantan. Kesenjangan infrastruktur, minimnya jumlah guru yang kompeten, serta terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran menjadi faktor yang menghambat efektivitas pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Menurut Sari & Wulandari (2022) dalam jurnal *Education and Human Development Journal*, keberhasilan pendidikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada adanya kebijakan afirmatif yang mendukung, seperti program Indonesia Pintar, beasiswa KIP Kuliah, dan pengembangan sekolah yang berbasis pada potensi serta kebutuhan komunitas lokal. Dengan demikian, diperlukan intervensi dari pemerintah yang menyeluruh dan berkelanjutan agar pendidikan benar-benar dapat menjadi sarana pemberdayaan. Pendidikan yang bersifat inklusif dan merata merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas serta tujuan pertama mengenai penghapusan kemiskinan. Sinergi antara kebijakan pendidikan, bantuan ekonomi bagi keluarga, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal telah terbukti mampu mempercepat keluarnya individu dan komunitas dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan (UNESCO, 2022).

Pendidikan memegang peranan kunci dalam menanggulangi kemiskinan terutama di daerah dengan kemiskinan ekstrem seperti Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa Papua Pegunungan menempati posisi tertinggi dalam angka kemiskinan nasional, yaitu 32,97 % pada Maret dan turun menjadi 29,66 % pada September 2024 (sekitar 331.120–365.430 jiwa). Papua Tengah menyusul dengan tingkat kemiskinan 29,76 %, sedangkan Papua Barat berada di 21,09 % pada periode yang sama. Rendahnya tingkat pendidikan—terutama di wilayah pedalaman berkorelasi kuat dengan tingginya kemiskinan tersebut. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat bahwa di Papua Barat, 29,29 % kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak

pernah bersekolah, dan hanya 0,8 % yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi. Data ini menggarisbawahi rendahnya partisipasi pendidikan sebagai kendala utama peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di ketiga provinsi tersebut (BPS, 2024; TNP2K, 2023). Tingkat efektivitas pendidikan dalam menanggulangi kemiskinan sangat bergantung pada sejauh mana akses, mutu, dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di daerah seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah, hambatan utama terletak pada keterbatasan akses dan sarana pendidikan. Banyak desa terpencil belum memiliki fasilitas sekolah yang layak, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, serta minimnya infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet. Kondisi ini menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah. Sari & Wulandari (2022) dalam jurnal *Education and Human Development Journal* menegaskan bahwa pendidikan tidak akan memberikan dampak nyata jika tidak disertai dengan perbaikan infrastruktur dan layanan dasar lainnya. Hal ini tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Pegunungan yang masih di bawah angka 60, bahkan di Kabupaten Nduga hanya mencapai 0,351 yang merupakan angka terendah secara nasional. Situasi ini mencerminkan adanya ketertinggalan yang mendalam dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Pendidikan yang bermutu dan merangkul semua kalangan menjadi kunci untuk memutus lingkaran kemiskinan.

Dengan akses pendidikan yang memadai, individu memiliki peluang lebih besar memperoleh pekerjaan berpenghasilan layak. Digdowiseiso (2021) menunjukkan bahwa setiap peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia secara signifikan berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional. Di Papua, upaya peningkatan mutu pendidikan perlu diperkuat lewat kebijakan afirmatif—misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa khusus wilayah 3T, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sejalan dengan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kewirausahaan berbasis kearifan budaya Papua. Selain itu, pelatihan keterampilan bagi masyarakat dewasa miskin juga penting, sebab pendidikan tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi turut memberdayakan kelompok usia produktif. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, pendidikan harus dimasukkan ke dalam pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan intervensi pendidikan dengan pembangunan ekonomi lokal serta penyediaan infrastruktur dasar. Di wilayah miskin Papua, pendidikan hanya akan efektif bila anak-anak dapat bersekolah tanpa menempuh jarak belasan kilometer, guru mengajar di ruang kelas yang layak, dan lulusan memiliki akses nyata ke pasar kerja. Dengan demikian, pendidikan berfungsi bukan sekadar sarana transfer pengetahuan, tetapi juga motor transformasi sosial-ekonomi. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) peran pendidikan di Papua dan daerah tertinggal lainnya sangatlah krusial. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan agar pendidikan menjadi jalan keluar dari kemiskinan struktural yang telah lama membelenggu kawasan timur Indonesia.

Adapun program-program pendukung pendidikan yang menjadi strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan, antara lain :

1. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Beasiswa ADik Papua)

Program ADik ditujukan bagi Orang Asli Papua (OAP) kepada siswa SMA/SMK yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu tetapi disertai dengan persyaratan administrasi yang ketat dan seleksi nilai rapor. Program ini menjadi salah satu akses pendidikan bagi siswa dari wilayah 3T (terdepan,terluar,tertinggal) termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa program ADik telah memberikan akses untuk ribuan pelajar dari Papua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terakreditasi (Kemendikti Saintek, 2025). Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di daerah Papua. Program beasiswa ADik sebagai program untuk meningkatkan sumber daya manusia Papua dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat meneruskan pendidikan tinggi PTN seluruh Indonesia. Beasiswa ini berupa bantuan keuangan yang

diberikan kepada perorangan untuk digunakan selama keberlangsungan pendidikan dan bantuan biaya yang diberikan sebesar Rp 600.000 - Rp800.000 per bulan. Kementerian Pendidikan Tinggi mendukung tunjangan hidup untuk biaya hidup selama enam bulan (Saputra, 2018). Program ADik yang dijalankan oleh pemerintah menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua, terutama di daerah tertinggal seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala utama yang dihadapi oleh mahasiswa asli Papua, seperti keterbatasan ekonomi, kondisi geografis yang sulit, dan minimnya akses ke perguruan tinggi unggulan di Indonesia. Selain itu dikutip dari blog Jubi Papua, sejak 2012 hingga 2023 tercatat di dalam arsip bahwa 10.000 mahasiswa Papua telah menerima ADik dengan sekitar 2.000 hingga 3.000 alumni sudah mendapatkan pekerjaan di berbagai instansi pemerintah dan BUMN (Alexander Leon, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua juga mencatat penurunan tingkat kemiskinan sekitar 3-5% dalam lima tahun terakhir, yang sebagian didorong oleh peningkatan akses pendidikan melalui program afirmasi seperti ADik. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima beasiswa program ADik mampu melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi negeri dan sebagian besar berhasil menyelesaikan studi mereka dan mendapatkan pekerjaan, sehingga program ini dapat membuka akses pendidikan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah Papua. Evaluasi program beasiswa ADik menunjukkan bahwa meskipun program ini sudah ada sejak 2012, tetapi pelaksanaannya dinilai belum efektif (Kelly Deish Ishak dan Bevaola Kusumasari, 2023). Beberapa kendala utama adalah distribusi informasi yang tidak merata, terutama di daerah pedalaman dan terpencil, serta sistem rekrutmen penerima beasiswa yang belum optimal. Selain itu, kurangnya pendampingan atau mentor bagi penerima beasiswa juga menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi mahasiswa Papua. Namun demikian, program ini tetap berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa Papua yang melanjutkan pendidikan tinggi dan membuka peluang peningkatan kualitas hidup mereka.

2. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program KIP merupakan program bantuan biaya pendidikan yang prioritasnya adalah mahasiswa miskin, rentan miskin, atau dengan kondisi khusus seperti tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) termasuk daerah Papua. Program KIP membantu siswa untuk tetap bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi negeri tanpa terhalang keterbatasan biaya, sehingga mereka dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi dan keluar dari lingkaran kemiskinan. KIP diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, seragam, dan perlengkapan sekolah. Berdasarkan data Kemendikbud Ristek yang dilaporkan dalam situs resmi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (2023-2024) total penerima KIP di wilayah Papua sebesar 1.369 mahasiswa, Papua bagian barat 1.323 mahasiswa, dan Papua bagian pegunungan sebesar 304 mahasiswa. Papua memiliki salah satu jumlah penerima KIP tertinggi pada tahun 2023 posisinya berada di bawah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Data dari BPS Provinsi Papua Pegunungan per Juni 2025, juga menunjukkan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di wilayah tersebut, yang sebagian dipengaruhi oleh program beasiswa dan bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah. Meskipun data spesifik tentang persentase peningkatan akses pendidikan tinggi akibat KIP Kuliah di Papua Pegunungan belum dipublikasikan secara terperinci, tren peningkatan jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di wilayah ini menjadi indikator positif keberhasilan program. Data terbaru dari KIP Berdasarkan data penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang terkait dengan KIP, penyaluran dana di wilayah Papua, termasuk Kota Jayapura dan Kecamatan Abepura, telah dilakukan secara rutin hingga awal 2025 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa KIP secara aktif menjangkau siswa di Papua yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pengaruh KIP dalam menurunkan angka putus sekolah, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 76% keluarga yang anaknya putus sekolah mengaku

penyebabnya adalah alasan ekonomi. Dengan adanya KIP yang memberikan bantuan biaya pendidikan, hambatan ekonomi ini dapat diminimalisir sehingga menurunkan angka putus sekolah, terutama di daerah miskin seperti Papua. Dengan meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui KIP diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua dan juga dapat membuka peluang kerja untuk upaya mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan laporan BPS Papua Tengah (2025), tingkat kemiskinan di Papua Tengah menunjukkan tren penurunan sekitar 3-5% dalam lima tahun terakhir, yang sebagian didukung oleh peningkatan akses pendidikan melalui program-program seperti KIP Kuliah. Dengan demikian, program KIP menjadi salah program penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan berkualitas di daerah tertinggal Papua.

3. Pendidikan Vokasi

Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengakselerasi pemetaan dan penataan pendidikan vokasi sebagai strategi utama untuk mencetak lulusan SMK yang siap kerja dan zaman sekarang. Dikutip dari artikel Tribun Sorong, Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat Daya, menegaskan bahwa pendidikan vokasi sangat penting agar generasi muda Papua memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap untuk digunakan pada dunia kerja. Pemerintah daerah memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sorong untuk meningkatkan kapasitas SDM anak muda Papua, sehingga mereka mampu bersaing dan mengurangi angka pengangguran di Papua Barat Daya. Proses pemetaan pendidikan vokasi di daerah Papua dilakukan secara bertahap dari tahun 2018 hingga 2022. Proses pemetaan ini menggunakan salah satu strategi yang konkret, yaitu pembuatan kelas industri yang melakukan kolaborasi antara sekolah vokasi dan perusahaan industri. Strategi ini memungkinkan siswa belajar secara langsung di perusahaan industri dalam waktu yang lama, contohnya Astra Motor Papua menjalin kerja sama dengan SMK jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) dan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) di Papua. Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan beasiswa vokasi, misalnya program beasiswa vokasi pertanian di Jepang bagi pelajar Orang Asli Papua (OAP) yang lolos seleksi administrasi sebanyak 135 orang pada tahun 2021. Program ini memberikan keahlian khusus yang dapat meningkatkan keterampilan dan peluang kerja di sektor pertanian, salah satu potensi unggulan Papua, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, kerja lulusan vokasi di Papua menunjukkan bahwa pendidikan vokasi memberikan kontribusi nyata dalam memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga meningkatkan peluang kerja dan penghasilan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah Papua.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui sektor pendidikan

1. Keterbatasan Akses Terhadap Pendidikan

Keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi tantangan serius khususnya di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat, yang secara geografis didominasi oleh pegunungan tinggi seperti Pegunungan Jayawijaya dengan puncak-puncak tertinggi di Indonesia, seperti Puncak Mandala dan Puncak Trikora. Wilayah-wilayah ini terdiri dari lembah-lembah sempit yang diapit oleh gunung-gunung curam, sehingga banyak kampung hanya dapat dijangkau melalui jalur terjal, berbahaya, dan sulit, termasuk menyeberangi sungai atau menuruni jurang. Keterbatasan infrastruktur jalan di Papua Barat tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga sangat mempengaruhi akses terhadap layanan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Sayangnya, Papua Barat masih tertinggal dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Indonesia dalam

hal pemerataan akses pendidikan. Salah satu penyebab utama dari ketertinggalan ini adalah sulitnya menjangkau wilayah-wilayah terpencil, yang umumnya belum memiliki sarana transportasi dan infrastruktur yang memadai. Minimnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta distribusi guru yang tidak merata menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini (Bappeda Papua Barat, 2015). Kondisi geografis Papua Barat yang menantang turut memperburuk situasi. Banyak anak di daerah pedalaman harus menempuh jarak jauh atau bahkan tidak bisa mengakses sekolah sama sekali. Selain faktor geografis, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, ditambah dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, turut berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi sekolah (Amaliah, 2015). Kesenjangan ini menyebabkan tidak sedikit anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Papua Barat juga menghadapi tantangan besar dalam hal penyediaan infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah berada dalam kondisi yang tidak layak dan tidak mampu menampung jumlah siswa yang terus bertambah. Situasi ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa di wilayah tersebut (Gewab dkk., 2015).

2. Kekurangan dan Kualitas Guru yang Tidak Merata

Ketimpangan jumlah guru di berbagai daerah kembali menjadi perhatian, merujuk pada data resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024/2025 . Provinsi Papua Pegunungan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah guru paling sedikit di Indonesia, yakni hanya 7.837 orang. Posisi selanjutnya ditempati oleh Papua Selatan dengan 8.683 guru, lalu Papua Barat Daya dengan 10.696 guru, dan Papua Tengah dengan 10.755 guru. Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Suprayoga Hadi, mengungkapkan bahwa Papua tengah menghadapi krisis kekurangan tenaga pengajar, terutama di sekolah swasta dan yayasan. Hal ini terjadi akibat banyaknya guru yang sebelumnya mengajar di sekolah-sekolah swasta berhasil lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan kemudian dipindahkan ke sekolah negeri. Kondisi ini menimbulkan kekosongan tenaga pendidik di ratusan sekolah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan proses belajar mengajar. Suprayoga menekankan perlunya langkah cepat dan solusi strategis untuk menjamin pendidikan di Papua tetap berjalan lancar. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan dari kementerian pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, berbagai pandangan dan analisis pun disampaikan. Perwakilan dari Kemendikbudristek menjelaskan bahwa meskipun dalam seleksi PPPK terdapat aturan yang mengharuskan guru swasta memperoleh izin dari kepala sekolah sebelum mendaftar, masih ditemukan kasus pelamar yang mengikuti seleksi tanpa izin resmi. Celah ini dinilai sebagai salah satu penyebab utama kekosongan guru di sekolah swasta. Di Papua Barat Daya saja, tercatat ada 334 sekolah swasta yang terdampak kekurangan guru akibat rekrutmen PPPK dan angka ini belum mencakup seluruh wilayah Papua. Kekurangan tenaga pendidik ini diperkirakan akan memberi dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, termasuk indikator penting seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi yang Minim dan Tidak Memadai

Tingginya tingkat kemiskinan di Papua, khususnya di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat, masih menjadi masalah krusial yang berdampak langsung pada dunia pendidikan. Data BPS per September 2024 menunjukkan bahwa 17,26% penduduk Papua hidup dalam kemiskinan, dengan Papua menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang mempersempit akses anak-anak terhadap pendidikan, terutama di daerah pedalaman yang minim infrastruktur. Banyak anak terpaksa putus sekolah karena harus membantu orang tua

bekerja atau tidak mampu menanggung biaya pendidikan. Statistik menunjukkan bahwa alasan utama anak putus sekolah adalah karena keterbatasan biaya (22,66%), diikuti oleh jauhnya jarak ke sekolah (13,52%) dan kebutuhan untuk bekerja (12,73%) (Rizaty, 2021). Masalah biaya menunjukkan rendahnya kemampuan ekonomi sebagian besar keluarga di Papua, yang berdampak pada rendahnya prioritas terhadap pendidikan. Selain itu, tidak sedikit anak-anak yang harus bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kendala ekonomi, kondisi sosial, tantangan geografis, serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan pendidikan memiliki konsekuensi serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Bagi individu, hal ini dapat membatasi akses terhadap pekerjaan yang layak dan mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Kondisi Fasilitas Pendidikan yang Minim

Banyak sekolah di wilayah khususnya Papua masih menghadapi kekurangan fasilitas dasar yang sangat krusial untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif. Kondisi ruang kelas di sejumlah sekolah masih jauh dari kata layak bangunan yang rusak, atap yang bocor, hingga ventilasi yang buruk kerap mengganggu proses belajar-mengajar, baik bagi siswa maupun guru. Fasilitas sanitasi seperti toilet dan tempat cuci tangan pun sering kali tidak memadai, yang berdampak langsung pada kesehatan serta kebersihan lingkungan sekolah. Tak hanya itu, sarana penunjang pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat peraga masih sangat terbatas. Akibatnya, proses belajar menjadi kurang bervariasi dan tidak maksimal dalam mendorong pemahaman siswa. Di wilayah pedalaman yang sulit diakses, tantangan semakin kompleks. Distribusi bahan bangunan dan perlengkapan sekolah kerap terhambat, membuat pembangunan dan perbaikan fasilitas berjalan lambat dan tidak merata. Ketimpangan ini menciptakan jurang perbedaan yang lebar antara sekolah-sekolah di perkotaan dengan yang berada di daerah terpencil. Banyak anak di pelosok negeri harus belajar dalam kondisi yang jauh dari ideal, yang pada akhirnya menurunkan semangat belajar dan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan secara keseluruhan. Meski pemerintah telah mengucurkan dana besar, termasuk melalui dana otonomi khusus dan program pembangunan infrastruktur, realisasi dan pengelolaannya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan tata kelola yang lebih transparan dan efektif agar bantuan benar-benar menyentuh sekolah-sekolah yang membutuhkan, khususnya di wilayah-wilayah terluar dan tertinggal.

5. Manajemen dan Distribusi Anggaran yang Tidak Merata

Pemerintah pusat menyebut angka kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menurun signifikan, dari 6,18% pada tahun 2014 menjadi 0,83% atau sekitar 2,3 juta orang per Maret 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Target nasional adalah mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada akhir 2024. Namun, di balik penurunan angka statistik nasional tersebut, masih terjadi ketimpangan yang sangat tajam di lapangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal seperti Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Madura. Warga di wilayah-wilayah ini, seperti Dominikus di Pulau Karaka dan Oktavianus di Intan Jaya, hidup dalam kondisi yang secara jelas masuk kategori miskin ekstrem: tanpa akses air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun pendapatan tetap. Ironisnya, dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat sangat besar. Merujuk data dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, selama periode 2002–2022, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp138,65 triliun. Ini belum termasuk transfer keuangan dan dana desa sebesar Rp702,3 triliun (2005–2021) serta belanja kementerian dan lembaga negara yang mencapai Rp251,29 triliun pada periode yang sama. Total akumulasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen fiskal yang besar terhadap

pembangunan Papua. Namun, efektivitas distribusi anggaran menjadi persoalan utama. Banyak warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak pernah merasakan program-program bantuan sosial yang disebutkan pemerintah. Menurut analisis dan pengakuan warga serta akademisi, dana tersebut seringkali hanya berputar di kalangan elite birokrasi lokal dan tidak menetes hingga ke tingkat masyarakat terbawah.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Sebaliknya, tingginya angka putus sekolah secara langsung berdampak pada peningkatan kemiskinan, karena individu yang tidak menyelesaikan pendidikan umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses lapangan pekerjaan yang layak dan produktif.

Kondisi ini sangat terlihat di tiga wilayah utama Provinsi Papua yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat yang hingga saat ini masih mencatat angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai program afirmatif, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, dampaknya belum merata. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi tantangan utama yang menghambat proses pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi. Faktor-faktor seperti rendahnya partisipasi sekolah, minimnya infrastruktur pendidikan, serta kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas dan terdistribusi merata semakin memperparah kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan yang bermutu tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan individu, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Strategi pengentasan kemiskinan di Papua dan daerah tertinggal lainnya harus diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menjamin kualitas, relevansi, dan keberlanjutan. Kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan lokal, didukung oleh pendanaan yang memadai, penguatan kapasitas guru, serta pemanfaatan teknologi untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Keseluruhan upaya ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan menjadi penopang utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas).

REFERENSI

- Adeline, M. M., Putra, F., & Ulum, M. C. (2024). *Pengaruh pendidikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia dalam perspektif teori human capital*. Universitas Brawijaya.
- Asisten Deputi Politik, Hukum dan Otonomi Daerah Sekretariat Wakil Presiden. (2024, Agustus 2). *Pastikan proses pendidikan terus berjalan, kekurangan guru swasta di Tanah Papua harus dicarikan solusi cepat*. Wakil Presiden Republik Indonesia. <https://www.wapresri.go.id/pastikan-proses-pendidikan-terus-berjalan-kekurangan-guru-swasta-di-tanah-papua-harus-dicarikan-solusi-cepat/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2025, Januari 16). *Persentase penduduk miskin di Jawa Timur September 2024 turun menjadi 9,56 persen*. <https://bappeda.jatimprov.go.id/2025/01/16/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-september-2024-turun-menjadi-9-koma-56-persen/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua (Bapperida Provinsi Papua). (2024). <https://bapperida.papua.go.id>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *[Metode baru] Rata-rata lama sekolah (tahun), 2022–2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI%3D/-metode-barurata-rata-lamasekolah.html>
- BBC News Indonesia. (2024). *Kemiskinan ekstrem di Indonesia turun signifikan, angka 0,83% pada 2024*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy4285j9d9o>
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press. <http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Blau, P. M., & Duncan, O. D. (1967). *The American occupational structure*. John Wiley and Sons.
- Digdowiseiso, K. (2021). The impact of education on poverty reduction in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(6), 1455–1461.
- Fadhilah, F. N., Nakhwa, I., Ahmad, F. R., Ivansyach, R. K., & Ridwan, R. (2024). Tantangan dan rekomendasi dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka untuk optimalisasi pendidikan di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(8), 1–10.
- Firmansyah, R. (2023). Diagnosing poverty eradication through literacy: Analysis from Indonesia National Socioeconomic Survey. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 1–15.
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2023). Indonesia social progress: The role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), Article e19810. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Menyoal anggaran pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Data Pokok Pendidikan (DAPODIK): Data Guru*. <https://dapo.dikdasmen.go.id/guru>
- Kemendikbudristek. (2021). *Panduan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kemendikbudristek. (2022). *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2022*. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen.
- Khairani, A., Hakiki, N. I., & Yopan, M. (2025). Analisis faktor penyebab angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian studi pustaka berbasis teori struktural. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 45–51.
- Khairunnisa, N. J., Ni'am Ahmad, A., Raihan, M., Azri, A., & Fattah, A. A. (2024). Prinsip keadilan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 13(1), 27–49.
- Khoeran, M. (2023). PIP, peningkatan mutu pembelajaran dan pengentasan kemiskinan siswa madrasah. *Kolom: Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Lim, S. S., & Lee, J. (2022). Aspirations, human capital investment, and the intergenerational transmission of poverty in Indonesia. *Social Indicators Research*, 162, 377–412. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02843-z>
- Qudsi, H., & Ashar, K. (2025). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Sosial dan Syariah (JDESS)*, 4(1). <https://doi.org/10.21776/jdess.2025.04.1.19>
- Shakira, B. O., Ramadhani, N. A., Salma, Z. H., & Azis, A. U. (2024). Analisis infrastruktur jalan dan pendidikan sebagai tantangan demokrasi dan tata kelola di Provinsi Papua Barat. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1.
- Ustama, D. D. (2009). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1–12.
- Wijaya, P. Y., & Suasih, N. R. (2021). One decade, 20 percent education budget: How about causality between education success and poverty? *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(1), 173–189. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i01.p09>